

PENGARUH KEBIJAKAN MONETER SYARIAH TERHADAP STABILITAS MATA UANG

Oleh:

Deviana Putri Septia Ningrum¹

Siti Aisyah Hidayatul Hasanah²

Yuni Zaroh³

Naufal Firdaus⁴

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, Jawa Timur (69162)

Korespondensi Penulis: 220721100139@student.trunojoyo.ac.id

***Abstract.** Sharia monetary policy has become the focus of attention in global economic studies, especially in the context of efforts to maintain currency stability. With principles based on Islamic values, sharia monetary policy emphasizes the prohibition of usury, transparency, justice and economic balance. Through the prohibition of usury, sharia monetary policy influences interest rates, credit, and inflation, which in turn impact currency exchange rates. Transparency in sharia monetary policy also increases public confidence in the financial system and currency, while fairness in the distribution of wealth can create sustainable socio-economic stability. The principles of economic balance in sharia monetary policy also play an important role in influencing currency stability by maintaining a balance between the supply and demand for money. As a result, Sharia monetary policy promotes long-term stability in the financial system and currency, which in turn contributes to economic sustainability and currency exchange rate stability in the long-term.*

***Keywords:** Sharia Monetary Policy, Currency Stability, Islamic Economics, Sharia Financial System, Sharia Central Bank.*

PENGARUH KEBIJAKAN MONETER SYARIAH TERHADAP STABILITAS MATA UANG

Abstrak. Kebijakan moneter syariah telah menjadi fokus perhatian dalam kajian ekonomi global, terutama dalam konteks upaya menjaga stabilitas mata uang. Dengan prinsip-prinsip yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, kebijakan moneter syariah menekankan larangan riba, transparansi, keadilan, dan keseimbangan ekonomi. Melalui larangan riba, kebijakan moneter syariah mempengaruhi suku bunga, kredit, dan inflasi, yang pada gilirannya berdampak pada nilai tukar mata uang. Transparansi dalam kebijakan moneter syariah juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan mata uang, sementara keadilan dalam distribusi kekayaan dapat menciptakan stabilitas sosial ekonomi yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip keseimbangan ekonomi dalam kebijakan moneter syariah juga memainkan peran penting dalam memengaruhi stabilitas mata uang dengan menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan uang. Hasilnya, kebijakan moneter syariah mempromosikan stabilitas jangka panjang dalam sistem keuangan dan mata uang, yang pada gilirannya berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi dan stabilitas nilai tukar mata uang dalam jangka panjang.

Kata Kunci: Kebijakan Moneter Syariah, Stabilitas Mata Uang, Ekonomi Islam, Sistem Keuangan Syariah, Bank Sentral Syariah.

LATAR BELAKANG

Dalam era globalisasi keuangan saat ini, stabilitas mata uang menjadi perhatian utama bagi otoritas moneter di seluruh dunia. Stabilitas mata uang yang kuat adalah fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Namun, dalam konteks sistem keuangan yang semakin kompleks, pertanyaan muncul mengenai bagaimana penerapan kebijakan moneter syariah mempengaruhi stabilitas mata uang dalam suatu negara. (C. Putri & Sari, 2018).

Kebijakan moneter syariah memiliki karakteristik unik yang berbeda dengan kebijakan moneter konvensional, terutama dalam hal larangan riba, spekulasi, dan transaksi yang mengandung unsur-unsur ketidakpastian (gharar) dalam Islam. Dalam kerangka ini, tujuan utama kebijakan moneter syariah adalah untuk mencapai stabilitas harga dan stabilitas sistem keuangan dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika Islam. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip ini mempengaruhi kebijakan moneter dan stabilitas mata uang. (Ichsan, Nur, 2017).

Dengan mempertimbangkan kompleksitas ini, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh kebijakan moneter syariah terhadap stabilitas mata uang, dengan fokus pada negara-negara dengan sistem keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. Kami akan menganalisis kontribusi kebijakan moneter syariah dalam menjaga stabilitas mata uang dalam menghadapi tantangan eksternal dan internal, serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Diharapkan penelitian ini akan memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi keuangan tentang pentingnya penerapan kebijakan moneter yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam mencapai stabilitas mata uang yang berkelanjutan.(Perdana et al., 2020).

KAJIAN TEORITIS

Peran Prinsip Syariah dalam Kebijakan Moneter

Peran prinsip syariah dalam kebijakan moneter adalah krusial dalam mengatur sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan spekulasi menjadi landasan bagi pengambilan keputusan dalam penetapan kebijakan moneter. Misalnya, larangan riba mendorong otoritas moneter untuk mencari alternatif dalam menetapkan suku bunga yang adil dan berkelanjutan, yang memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga.(I. A. Putri & Nasution, 2022).

Selain itu, prinsip syariah juga mempengaruhi pengaturan likuiditas dan regulasi pasar keuangan. Kebijakan moneter yang berbasis syariah cenderung lebih memperhatikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat dalam penetapan kebijakan likuiditas dan pengelolaan risiko keuangan. Ini dapat tercermin dalam pendekatan yang lebih konservatif terhadap risiko dan kehati-hatian dalam penggunaan instrumen keuangan yang melibatkan unsur spekulatif atau gharar. (Mansur, 2013).

Dengan demikian, peran prinsip syariah dalam kebijakan moneter adalah untuk menciptakan sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, memastikan distribusi keadilan, kestabilan harga, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui penerapan prinsip syariah dalam kebijakan moneter, diharapkan dapat tercipta lingkungan keuangan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat Muslim dan non-Muslim.(Wulandari, 2021).

PENGARUH KEBIJAKAN MONETER SYARIAH TERHADAP STABILITAS MATA UANG

Peran prinsip syariah dalam kebijakan moneter adalah kunci untuk membentuk ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, sambil menghindari dampak negatif yang tidak diinginkan. Kebijakan moneter Islam merujuk pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang terinspirasi oleh ajaran Al-Quran dan Hadis. Di antara poin-poin sentralnya adalah larangan terhadap praktik riba atau bunga. Dalam kerangka kebijakan moneter, prinsip-prinsip syariah mendorong peningkatan cadangan devisa, pembatasan pengeluaran investasi, dan pengaturan jumlah uang beredar untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, dan pembangunan ekonomi yang merata.

Pendekatan kebijakan moneter yang didasarkan pada prinsip syariah juga menekankan pentingnya distribusi keadilan dalam sistem keuangan. Ini mencakup perlindungan terhadap ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam transaksi keuangan. Selain itu, prinsip-prinsip syariah juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan moneter, memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan umum dan mencapai tujuan-tujuan makroekonomi yang diinginkan. (Sitepu, 2017).

Dengan mendasarkan kebijakan moneter pada prinsip-prinsip syariah, diharapkan sistem keuangan dapat beroperasi dalam batas-batas yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, sambil tetap memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ini menempatkan penekanan yang kuat pada keadilan, transparansi, dan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga, yang merupakan elemen-elemen kunci dalam membangun ekonomi yang sehat dan berdaya tahan.

Pengaruh Kebijakan Moneter Syariah terhadap Inflasi dan Nilai Tukar

Kebijakan moneter syariah mempengaruhi inflasi dan nilai tukar dengan cara mengatur jumlah uang beredar, mengeluarkan atau mengurangi uang beredar, dan mengatur suku bunga. Kebijakan moneter syariah menggunakan dinar dan dirham atau gold standard, yang relatif lebih kecil terhadap terjadinya inflasi ketimbang sistem fiat money. Hal ini disebabkan oleh nilai intrinsik mata uang yang di backup dengan gold standard, yang otomatis menjaga nilai tukar mata uang terhadap mata uang lain. (Prasetyo, 2017).

Kebijakan moneter syariah juga mengurangi bunga dan transaksi ribawi, yang merubah makna uang sebagai alat tukar menjadi sebuah komoditi. Dengan kata lain, menutup sebuah lubang dengan tanpa disadari menciptakan lubang yang lebih besar lagi. Hal ini mengurangi permasalahan inflasi yang timbul dari sistem kapitalis yang memupuk bunga dan mengubah mata uang menjadi komoditi.(Alwaris & Hasan, 2023).

Dalam konteks kebijakan moneter syariah, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing mengakibatkan meningkatnya nilai ekspor. Harga barang domestik yang lebih murah menarik minat pihak luar, yang mengakibatkan inflasi. Namun, kenaikan jumlah uang beredar yang disediakan oleh kebijakan moneter syariah dapat mengurangi inflasi, karena jumlah uang beredar yang lebih rendah akan mengurangi permintaan agregat.

Pengaruh kebijakan moneter syariah terhadap inflasi dan nilai tukar menjadi perhatian penting dalam konteks ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam. Salah satu aspek penting dalam kebijakan moneter syariah adalah pengendalian inflasi, yang merupakan tujuan utama dalam memastikan stabilitas harga yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan. Kebijakan moneter syariah cenderung lebih konservatif dalam menetapkan suku bunga dan lebih memperhatikan stabilitas harga jangka panjang, yang dapat memiliki dampak yang berbeda terhadap tingkat inflasi dibandingkan dengan kebijakan konvensional.(Perdana et al., 2020).

Selain itu, pengaruh kebijakan moneter syariah juga dapat terlihat dalam nilai tukar mata uang. Penetapan suku bunga yang lebih rendah atau penggunaan instrumen keuangan yang lebih konservatif dalam kebijakan moneter syariah dapat mempengaruhi aliran modal dan permintaan mata uang negara tersebut. Implikasi ini dapat berdampak pada nilai tukar mata uang, terutama dalam jangka panjang, karena faktor-faktor seperti keseimbangan pembayaran dan kepercayaan investor dapat berubah seiring dengan kebijakan moneter yang diterapkan.

Dalam kerangka yang lebih luas, penting untuk memahami bahwa pengaruh kebijakan moneter syariah terhadap inflasi dan nilai tukar dapat berbeda-beda tergantung pada konteks ekonomi dan sistem keuangan negara yang bersangkutan. Dalam mengkaji dampak kebijakan moneter syariah, perlu diperhatikan juga interaksi dengan faktor-faktor eksternal dan internal lainnya yang dapat memengaruhi inflasi dan nilai tukar, seperti politik fiskal, kondisi pasar global, dan ketidakpastian ekonomi.

PENGARUH KEBIJAKAN MONETER SYARIAH TERHADAP STABILITAS MATA UANG

Pengalaman Negara-Negara dengan Sistem Keuangan Syariah

Pengalaman negara-negara dengan sistem keuangan syariah memberikan wawasan berharga tentang implementasi kebijakan moneter syariah dan dampaknya terhadap stabilitas mata uang. Malaysia, sebagai salah satu pemimpin dalam industri keuangan syariah, telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengembangan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pengalaman Malaysia dalam mengadopsi kebijakan moneter syariah menunjukkan bahwa pendekatan yang berbasis pada keadilan, transparansi, dan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga dapat menghasilkan hasil yang positif dalam jangka panjang. (Affandi, 2016).

Selain Malaysia, negara-negara lain seperti Indonesia, Uni Emirat Arab, dan Pakistan juga memiliki pengalaman yang berharga dalam mengembangkan sistem keuangan syariah. Meskipun setiap negara memiliki konteks dan tantangan yang berbeda, pengalaman ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan moneter syariah dapat berhasil jika didukung oleh kerangka regulasi yang kuat, infrastruktur keuangan yang memadai, dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Pengalaman-pengalaman ini memberikan pembelajaran berharga bagi negara-negara lain yang tertarik untuk mengadopsi sistem keuangan syariah dan memperkuat stabilitas mata uang mereka. (Yani & M.Nur, 2020).

Secara keseluruhan, pengalaman negara-negara dengan sistem keuangan syariah menyoroti pentingnya kesesuaian antara prinsip-prinsip syariah, kebijakan moneter, dan tujuan makroekonomi. Dengan memahami tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mengadopsi kebijakan moneter syariah, negara-negara lain dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam memperkuat sistem keuangan mereka, mempromosikan stabilitas mata uang, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Negara-negara dengan sistem keuangan syariah telah mengalami berbagai pengalaman dalam pengembangan dan pengaplikasian prinsip-prinsip syariah dalam keuangan. Berikut adalah beberapa contoh (Affandi, 2016):

1. Indonesia: Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Pendekatan ini bukan hanya mencakup aspek keagamaan, tetapi juga memiliki implikasi ekonomi yang signifikan. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi

Islam, Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya dan pasar yang besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu bidang potensial untuk pengembangan ekonomi syariah di Indonesia adalah dalam mendukung pendanaan prioritas-prioritas pembangunan, seperti proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, dan pertanian. Dengan memanfaatkan instrumen-instrumen keuangan syariah seperti obligasi sukuk dan pembiayaan mikro syariah, Indonesia dapat memobilisasi dana dalam skala besar untuk mendukung proyek-proyek strategis yang dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Namun, untuk meraih potensi penuh dari ekonomi dan keuangan syariah, Indonesia perlu terus memperkuat infrastruktur pasar, regulasi yang kondusif, dan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat menjadi pusat keuangan syariah yang terkemuka di dunia, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat nasional dan regional.

2. **Malaysia:** Di Malaysia, pertumbuhan ekonomi syariah telah menjadi fokus utama dalam upaya pemerintah untuk memperkuat sektor keuangan negara. Dengan aset perbankan syariah mencapai RM 350,8 miliar (USD 166 miliar), sektor keuangan syariah Malaysia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sektor ini menguasai 21% pangsa pasar, menegaskan posisi Malaysia sebagai salah satu pemimpin dalam industri keuangan syariah di tingkat global.

Pertumbuhan sektor keuangan syariah di Malaysia tidak hanya didorong oleh permintaan domestik, tetapi juga oleh minat internasional yang meningkat terhadap produk-produk keuangan berbasis syariah. Pemerintah Malaysia telah aktif dalam mempromosikan pembangunan sektor keuangan syariah sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat status negara sebagai pusat keuangan internasional. Langkah-langkah ini telah mencakup peningkatan infrastruktur pasar, insentif perpajakan, dan dukungan untuk inovasi produk keuangan syariah.

Dengan pertumbuhan yang stabil dan dukungan pemerintah yang kuat, sektor keuangan syariah Malaysia diharapkan akan terus berkembang dalam beberapa tahun mendatang. Ini tidak hanya akan memberikan kontribusi

PENGARUH KEBIJAKAN MONETER SYARIAH TERHADAP STABILITAS MATA UANG

signifikan terhadap perekonomian Malaysia, tetapi juga akan memperkuat posisi negara ini sebagai pusat keuangan syariah yang penting di tingkat global.

3. Bahrain: Di Bahrain, sistem keuangan syariah telah menjadi bagian integral dari struktur keuangan negara sejak tahun 1970-an. Bahrain merupakan salah satu pelopor dalam pengembangan sistem keuangan syariah di dunia Arab. Dengan didukung oleh regulasi yang kondusif dan dukungan pemerintah yang kuat, Bahrain telah berhasil membangun lingkungan yang ramah bagi lembaga-lembaga keuangan syariah. Sejak saat itu, Bahrain telah menjadi salah satu negara dengan jumlah institusi keuangan syariah terbanyak di dunia.

Keberhasilan Bahrain dalam mengembangkan sistem keuangan syariah tidak hanya didasarkan pada dukungan pemerintah, tetapi juga pada inovasi produk dan layanan keuangan syariah yang terus berkembang. Lembaga-lembaga keuangan syariah di Bahrain terus berinovasi dalam menciptakan produk-produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang. Hal ini telah membantu memperkuat posisi Bahrain sebagai pusat keuangan syariah yang terkemuka di dunia.

Dengan warisan yang kaya dan komitmen yang kuat terhadap pengembangan keuangan syariah, Bahrain diharapkan akan terus menjadi pemimpin dalam industri keuangan syariah. Dukungan pemerintah yang berkelanjutan, kerjasama lintas sektor, dan inovasi produk keuangan syariah akan menjadi kunci untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi Bahrain sebagai pusat keuangan syariah global.

4. *Gulf Cooperation Council (GCC)*: Negara-negara *Gulf Cooperation Council (GCC)* telah lama menjadi tujuan investasi bagi investor konvensional internasional yang mencari peluang pertumbuhan dan diversifikasi portofolio mereka. Sementara itu, di kawasan Asia Tenggara, negara-negara di ASEAN semakin menaruh minat pada kelas aset baru dalam keuangan syariah. Kombinasi antara daya tarik investasi yang kuat dari negara-negara GCC dan minat yang meningkat dari investor di ASEAN telah menciptakan kesempatan baru dalam pengembangan industri keuangan syariah di kedua kawasan tersebut.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan peluang investasi yang beragam di negara-negara GCC telah menarik minat investor internasional, termasuk investor

konvensional yang mencari diversifikasi portofolio mereka. Di sisi lain, negara-negara di ASEAN, yang diakui sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang signifikan, semakin menyadari potensi keuangan syariah dalam memperluas pilihan investasi mereka. Dengan demikian, ada kesempatan besar bagi lembaga keuangan syariah di GCC dan ASEAN untuk berkolaborasi dalam memenuhi permintaan akan produk dan layanan keuangan syariah yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar.

Melalui kerjasama lintas regional antara GCC dan ASEAN, industri keuangan syariah dapat mengambil langkah yang lebih maju dalam memperluas cakupan globalnya. Ini tidak hanya akan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi kedua kawasan, tetapi juga akan memperkuat posisi mereka sebagai pusat keuangan syariah yang penting di tingkat internasional. Dengan pemahaman mendalam tentang pasar dan kebutuhan investor di kedua kawasan, kerjasama ini memiliki potensi untuk membentuk masa depan industri keuangan syariah yang berkelanjutan dan inklusif.

5. Turki: Turki telah menjadi pusat penting dalam pengembangan sistem keuangan syariah di tingkat global. Negara ini telah mengambil langkah progresif dalam membangun infrastruktur keuangan syariah yang kuat dan beragam. Dengan regulasi yang kondusif dan dukungan pemerintah yang kuat, Turki telah berhasil menarik minat investor dan lembaga-lembaga keuangan syariah dari berbagai belahan dunia. Sejak itu, Turki telah menjadi negara dengan jumlah institusi keuangan syariah terbanyak di dunia, menegaskan posisinya sebagai pemimpin dalam industri keuangan syariah.

Pertumbuhan sektor keuangan syariah di Turki telah didorong oleh berbagai faktor, termasuk dukungan pemerintah yang berkelanjutan, inovasi produk keuangan syariah, dan permintaan pasar yang meningkat. Lembaga-lembaga keuangan syariah di Turki terus berinovasi dalam menciptakan produk-produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang. Hal ini telah memperkuat posisi Turki sebagai destinasi utama bagi para pelaku industri keuangan syariah.

Dengan potensi pertumbuhan yang masih besar, Turki terus berkomitmen untuk memperluas dan memperkuat sektor keuangan syariahnya. Melalui

PENGARUH KEBIJAKAN MONETER SYARIAH TERHADAP STABILITAS MATA UANG

kerjasama lintas sektor dan lintas negara, Turki dapat memperluas dampak positifnya dalam pengembangan industri keuangan syariah di tingkat global. Ini tidak hanya akan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi Turki sendiri, tetapi juga akan meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan industri keuangan syariah secara keseluruhan.

Implikasi Kebijakan Moneter Syariah terhadap Tingkat Inflasi

Implikasi kebijakan moneter syariah terhadap tingkat inflasi dapat dilihat dari beberapa aspek yang mencakup penggunaan sistem ekonomi berbasis syariah, pengaruh nilai tukar mata uang, dan pengendalian inflasi melalui mekanisme keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pertama, penggunaan dinar, dirham, atau gold standard dalam sistem moneter syariah dapat membantu mengurangi inflasi karena nilai intrinsik mata uang yang di-backup dengan emas dapat menjaga stabilitas nilai tukarnya terhadap mata uang asing, mengurangi dampak inflasi yang disebabkan oleh pelemahan nilai tukar domestik. Selain itu, penghilangan bunga dan transaksi ribawi dalam sistem keuangan syariah juga dapat membantu mengendalikan inflasi, karena sistem kapitalis yang memupuk bunga dapat menciptakan inflasi yang merugikan ekonomi. (Dahlan, 2015).

Dalam konteks kebijakan moneter syariah, upaya kontraksi moneter (mengurangi likuiditas bank umum) dan ekspansi moneter (menambah likuiditas bank umum) dilakukan dengan prinsip syariah untuk mengendalikan inflasi. Kontraksi moneter yang berhubungan positif dengan inflasi dan ekspansi moneter yang berhubungan negatif dengan inflasi menjadi instrumen penting dalam mengatur tingkat inflasi dengan prinsip Syariah. Dengan demikian, kebijakan moneter syariah tidak hanya berfokus pada stabilitas harga, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan dan keberkelanjutan ekonomi dalam mengendalikan inflasi.

Implikasi kebijakan moneter syariah terhadap tingkat inflasi memunculkan pertanyaan signifikan dalam literatur ekonomi. Kebijakan moneter syariah cenderung mengadopsi pendekatan yang lebih konservatif dalam penetapan suku bunga Turki telah menjadi pusat penting dalam pengembangan sistem keuangan syariah di tingkat global. Negara ini telah mengambil langkah progresif dalam membangun infrastruktur keuangan syariah yang kuat dan beragam. Dengan regulasi yang kondusif dan dukungan pemerintah yang kuat, Turki telah berhasil menarik minat investor dan lembaga-lembaga keuangan

syariah dari berbagai belahan dunia. Sejak itu, Turki telah menjadi negara dengan jumlah institusi keuangan syariah terbanyak di dunia, menegaskan posisinya sebagai pemimpin dalam industri keuangan syariah.

Pertumbuhan sektor keuangan syariah di Turki telah didorong oleh berbagai faktor, termasuk dukungan pemerintah yang berkelanjutan, inovasi produk keuangan syariah, dan permintaan pasar yang meningkat. Lembaga-lembaga keuangan syariah di Turki terus berinovasi dalam menciptakan produk-produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang. Hal ini telah memperkuat posisi Turki sebagai destinasi utama bagi para pelaku industri keuangan syariah.

Dengan potensi pertumbuhan yang masih besar, Turki terus berkomitmen untuk memperluas dan memperkuat sektor keuangan syariahnya. Melalui kerjasama lintas sektor dan lintas negara, Turki dapat memperluas dampak positifnya dalam pengembangan industri keuangan syariah di tingkat global. Ini tidak hanya akan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi Turki sendiri, tetapi juga akan meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan industri keuangan syariah secara keseluruhan. ga dan pengelolaan likuiditas, dengan fokus pada stabilitas harga jangka panjang. Hal ini berbeda dengan kebijakan moneter konvensional yang sering kali lebih agresif dalam menanggapi fluktuasi pasar. Studi-studi terdahulu telah menyoroti bahwa pendekatan konservatif ini dapat mempengaruhi tingkat inflasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, tergantung pada konteks ekonomi dan keuangan yang bersangkutan.

Analisis lebih lanjut mengenai implikasi kebijakan moneter syariah terhadap tingkat inflasi juga menunjukkan bahwa pendekatan ini cenderung lebih memperhatikan aspek keadilan dan kesejahteraan jangka panjang. Dalam konteks ini, penentuan suku bunga yang lebih rendah atau penggunaan instrumen keuangan yang lebih konservatif dapat menunda pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, namun dapat membawa manfaat jangka panjang dalam mempertahankan stabilitas harga. Implikasi ini menunjukkan bahwa penilaian yang holistik terhadap kebijakan moneter syariah diperlukan untuk memahami bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat inflasi dalam berbagai konteks ekonomi.

PENGARUH KEBIJAKAN MONETER SYARIAH TERHADAP STABILITAS MATA UANG

Dampak Kebijakan Moneter Syariah terhadap Nilai Tukar Mata Uang

Dampak kebijakan moneter syariah terhadap nilai tukar mata uang adalah kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan kebijakan. Kebijakan moneter yang tepat dan efektif dapat membantu menjaga stabilitas nilai mata uang, mengendalikan inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan daya saing ekspor.

Kebijakan moneter syariah menghilangkan unsur riba dan obligasi bank, yang dilarang dalam ekonomi Islam. Sistem moneter syariah beroperasi pada aturan emas, yang memiliki dampak positif terhadap stabilitas nilai tukar mata uang terhadap mata uang asing. Kebijakan moneter syariah juga dapat mengatur aliran uang dalam perekonomian untuk menjaga stabilitas harga, inflasi terkendali, dan lapangan pasar.

Kebijakan moneter syariah memiliki persamaan dan perbedaan prinsip dengan sistem kebijakan moneter konvensional. Penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti menunjukkan bahwa kebijakan moneter syariah dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang terhadap mata uang asing melalui jalur pembiayaan perbankan syariah. (Safitri, 2013).

Dalam konteks kebijakan moneter syariah, bank sentral mengendalikan jumlah uang beredar, suku bunga, dan likuiditas di pasar keuangan untuk mencapai stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Kebijakan moneter syariah juga dapat mengatur suplai uang agar tidak beredar secara berlebihan, yang dapat memiliki dampak positif terhadap stabilitas nilai tukar mata uang.

Dampak kebijakan moneter syariah terhadap nilai tukar mata uang merupakan aspek yang penting dalam analisis keuangan Islam. Kebijakan moneter syariah, yang seringkali berfokus pada prinsip keadilan, transparansi, dan stabilitas jangka panjang, dapat memiliki implikasi yang berbeda terhadap nilai tukar mata uang suatu negara. Penetapan suku bunga yang lebih rendah dan penggunaan instrumen keuangan yang lebih konservatif dalam kebijakan moneter syariah dapat mempengaruhi aliran modal dan kepercayaan investor, yang pada gilirannya dapat memengaruhi nilai tukar mata uang dalam jangka panjang. (Widyastuti, 2019).

Analisis lebih mendalam mengenai dampak kebijakan moneter syariah terhadap nilai tukar mata uang juga memperhitungkan faktor-faktor eksternal dan internal yang memengaruhi dinamika pasar valuta asing. Perbedaan dalam pendekatan kebijakan

moneter syariah dan konvensional dapat memperkuat atau melemahkan nilai tukar mata uang suatu negara, tergantung pada faktor-faktor seperti keseimbangan pembayaran, kondisi pasar global, dan kebijakan ekonomi makro lainnya. Dengan memperhitungkan semua faktor ini, penilaian yang holistik terhadap dampak kebijakan moneter syariah terhadap nilai tukar mata uang dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang interaksi kompleks antara sistem keuangan syariah dan pasar valuta asing.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif tentang pengaruh kebijakan moneter syariah terhadap stabilitas mata uang mengungkapkan dinamika kompleks antara prinsip-prinsip ekonomi Islam dan stabilitas nilai tukar. Melalui wawancara mendalam dengan pakar ekonomi Islam dan praktisi keuangan syariah, ditemukan bahwa pendekatan kebijakan moneter yang berbasis pada prinsip syariah sering kali lebih berorientasi pada stabilitas jangka panjang daripada keuntungan jangka pendek. Studi ini menyoroti bahwa fokus pada keadilan dalam distribusi dan penggunaan sumber daya ekonomi, yang merupakan aspek sentral dari kebijakan moneter syariah, dapat membantu memperkuat kepercayaan dalam mata uang negara dan, dengan demikian, meningkatkan stabilitas nilai tukar. (Syarif, 2019).

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter syariah cenderung lebih memperhatikan aspek keseimbangan pembayaran dan pertumbuhan ekonomi riil daripada sekadar memperhatikan target inflasi atau tingkat suku bunga tertentu. Dengan demikian, pendekatan ini dapat memiliki dampak yang berbeda terhadap stabilitas mata uang dibandingkan dengan kebijakan moneter konvensional. Hasil penelitian ini memberikan wawasan penting bagi otoritas moneter dalam merancang kebijakan yang mempertimbangkan nilai-nilai Islam serta faktor-faktor ekonomi tradisional untuk mencapai stabilitas mata uang yang optimal.

Penelitian kualitatif ini juga menyoroti pentingnya koordinasi antara otoritas moneter, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat dalam mempromosikan stabilitas mata uang dalam konteks kebijakan moneter syariah. Kesimpulan ini menekankan perlunya kerja sama lintas sektor dan pendekatan yang holistik untuk mencapai stabilitas mata uang yang kokoh, yang tidak hanya memperhitungkan faktor-faktor ekonomi, tetapi juga nilai-nilai etika dan moral yang dijunjung oleh prinsip-prinsip syariah.

PENGARUH KEBIJAKAN MONETER SYARIAH TERHADAP STABILITAS MATA UANG

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian tersebut menyoroti beberapa poin penting tentang pengaruh kebijakan moneter syariah terhadap stabilitas mata uang:

1. Peran Prinsip Syariah dalam Kebijakan Moneter: Prinsip-prinsip seperti larangan riba, gharar, dan spekulasi menjadi landasan bagi kebijakan moneter syariah. Kebijakan moneter syariah bertujuan untuk mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan yang adil, dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika Islam.
2. Pengaruh Kebijakan Moneter Syariah terhadap Inflasi dan Nilai Tukar: Kebijakan moneter syariah dapat mempengaruhi inflasi dan nilai tukar dengan mengatur jumlah uang beredar, menghilangkan bunga dan transaksi ribawi, serta mempertimbangkan prinsip emas. Pendekatan ini cenderung lebih konservatif dan berorientasi pada stabilitas jangka panjang.
3. Pengalaman Negara-Negara dengan Sistem Keuangan Syariah: Negara-negara seperti Malaysia, Indonesia, Bahrain, dan Turki telah mengalami pertumbuhan dalam sektor keuangan syariah. Pengalaman mereka menunjukkan bahwa dengan dukungan pemerintah dan regulasi yang kondusif, implementasi kebijakan moneter syariah dapat berhasil dalam memperkuat stabilitas mata uang dan sistem keuangan.
4. Implikasi Kebijakan Moneter Syariah terhadap Tingkat Inflasi: Kebijakan moneter syariah dapat memiliki implikasi yang berbeda terhadap tingkat inflasi, tergantung pada konteks ekonomi dan kebijakan yang diterapkan. Pendekatan konservatif dalam penetapan suku bunga dan pengelolaan likuiditas dapat mempengaruhi inflasi dalam jangka panjang.
5. Dampak Kebijakan Moneter Syariah terhadap Nilai Tukar Mata Uang: Kebijakan moneter syariah dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang dengan mengatur suplai uang dan menggunakan sistem ekonomi berbasis emas. Faktor-faktor eksternal dan internal juga dapat memengaruhi nilai tukar, sehingga perlu dilakukan penilaian yang holistik.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif melalui wawancara mendalam dengan pakar ekonomi Islam dan praktisi keuangan syariah. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang kompleksitas pengaruh kebijakan moneter syariah terhadap stabilitas mata uang.

Prinsip-prinsip Kebijakan Moneter Syariah (Indonesia, n.d.):

Prinsip-prinsip utama kebijakan moneter syariah membentuk landasan yang kuat bagi sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Salah satu prinsip paling fundamental adalah larangan riba atau bunga dalam semua bentuknya. Larangan ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi keuangan, serta mendorong investasi yang berdasarkan pada prinsip risiko dan keuntungan yang adil. Dengan menghindari riba, kebijakan moneter syariah mendorong pembiayaan yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada ekonomi riil, yang pada gilirannya dapat meningkatkan stabilitas ekonomi dan mata uang.

Selain itu, transparansi menjadi prinsip kunci dalam kebijakan moneter syariah. Transparansi yang tinggi dalam pengambilan keputusan kebijakan moneter memungkinkan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan, sehingga memperkuat kepercayaan dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Prinsip keadilan juga ditekankan dalam kebijakan moneter syariah, yang mengarah pada distribusi yang lebih merata dari manfaat dan beban keuangan dalam masyarakat. Ini mencakup keadilan dalam akses terhadap layanan keuangan dan perlakuan yang sama bagi semua pihak, tanpa membedakan berdasarkan status sosial atau kekayaan.

Terakhir, keseimbangan menjadi prinsip yang esensial dalam kebijakan moneter syariah. Keseimbangan ini mencakup keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas, antara penawaran dan permintaan uang, serta antara risiko dan keuntungan. Dengan menjaga keseimbangan ini, kebijakan moneter syariah berusaha untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, yang pada akhirnya mendukung stabilitas mata uang dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, kebijakan moneter syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap stabilitas dan keberlanjutan ekonomi serta mata uang dalam jangka panjang.

Pengaruh Larangan Riba terhadap Stabilitas Mata Uang (Ali & Miftahurrohman, 2015):

Larangan riba memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas mata uang dalam konteks kebijakan moneter syariah. Pertama-tama, dengan menghindari praktik

PENGARUH KEBIJAKAN MONETER SYARIAH TERHADAP STABILITAS MATA UANG

bunga atau riba, kebijakan moneter syariah mendorong investasi yang lebih produktif dan berorientasi pada ekonomi riil. Ini berarti bahwa sumber daya keuangan lebih cenderung dialokasikan untuk proyek-proyek yang memberikan nilai tambah nyata bagi perekonomian, seperti infrastruktur, industri, dan sektor riil lainnya. Dengan demikian, stabilitas mata uang cenderung terjaga karena investasi yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

Selain itu, larangan riba dalam kebijakan moneter syariah mempromosikan keadilan dalam sistem keuangan. Dengan tidak adanya bunga, transaksi keuangan menjadi lebih adil dan seimbang, meminimalkan ketidaksetaraan dalam distribusi manfaat dan beban keuangan di masyarakat. Hal ini dapat mengurangi ketidakstabilan sosial dan ekonomi yang dapat memengaruhi nilai mata uang, karena ketidakadilan dalam sistem keuangan sering kali menjadi pemicu konflik sosial dan ketidakstabilan ekonomi.

Terakhir, larangan riba dalam kebijakan moneter syariah juga membantu mengurangi risiko spekulasi dan gejolak pasar yang berlebihan. Dengan tidak adanya bunga, motivasi untuk melakukan spekulasi atau mengambil risiko yang tidak seimbang dalam investasi menjadi berkurang. Hal ini dapat membantu menjaga stabilitas mata uang dengan mencegah terjadinya gejolak pasar yang tidak stabil dan merugikan bagi nilai mata uang. Dengan demikian, larangan riba dalam kebijakan moneter syariah berperan penting dalam menjaga stabilitas mata uang dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Larangan riba dalam kebijakan moneter syariah memiliki dampak yang signifikan pada kebijakan suku bunga, kredit, dan inflasi. Pertama-tama, larangan riba mendorong penggunaan instrumen keuangan yang berbasis pada prinsip keuntungan bersama dan berbagi risiko, seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Hal ini dapat mengubah dinamika penetapan suku bunga, di mana suku bunga lebih cenderung mencerminkan keuntungan yang adil bagi kedua belah pihak, bukan hanya keuntungan bagi pemberi pinjaman. Dengan demikian, larangan riba dapat menghasilkan suku bunga yang lebih stabil dan adil, yang pada gilirannya dapat memengaruhi ketersediaan kredit dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Ketika larangan riba diterapkan, kebijakan kredit dalam sistem keuangan syariah menjadi lebih cermat dan berorientasi pada prinsip keadilan dan transparansi. Ini berarti bahwa lembaga keuangan syariah lebih memperhatikan risiko-risiko yang terlibat dalam transaksi kredit dan berupaya untuk mengurangi kemungkinan gagal bayar atau

pembayaran yang terlambat. Akibatnya, kredit yang diberikan cenderung lebih terkontrol dan berbasis pada analisis risiko yang lebih ketat, yang dapat mempengaruhi tingkat akses terhadap kredit bagi masyarakat dan bisnis. Namun, pendekatan yang lebih hati-hati ini juga dapat membantu mencegah kemungkinan terjadinya gelembung kredit yang berlebihan dan krisis keuangan.

Dari segi inflasi, larangan riba dapat memberikan dampak yang kompleks. Dengan mengurangi motivasi untuk spekulasi dan pengembalian yang tinggi dalam investasi, larangan riba dapat membantu mencegah terjadinya inflasi yang disebabkan oleh pembengkakan uang yang tidak seimbang. Namun, di sisi lain, larangan riba juga dapat mengurangi fleksibilitas kebijakan moneter dalam menanggapi tekanan inflasi melalui penyesuaian suku bunga. Hal ini karena instrumen kebijakan moneter konvensional seperti suku bunga tidak lagi tersedia dalam konteks larangan riba. Implikasinya terhadap nilai tukar mata uang dapat tergantung pada bagaimana kebijakan moneter syariah merespons tekanan inflasi dan dinamika pasar yang berkaitan dengan kebijakan tersebut.

Efek Transparansi dan Keadilan dalam Kebijakan Moneter Syariah (Widyastuti, 2019):

Transparansi dalam kebijakan moneter syariah memiliki peran penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan mata uang. Pertama-tama, transparansi memastikan bahwa kebijakan moneter dan operasi lembaga keuangan syariah dijalankan secara terbuka dan jujur, mengurangi risiko manipulasi atau praktik yang merugikan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat memiliki keyakinan bahwa kebijakan moneter yang diterapkan didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan keadilan yang merupakan landasan dari sistem keuangan syariah.

Selain itu, transparansi meningkatkan pemahaman masyarakat tentang mekanisme keuangan syariah dan cara kerja sistem moneter yang berbasis syariah. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat mengapresiasi keuntungan dan manfaat dari prinsip-prinsip syariah dalam menjaga stabilitas mata uang dan keselamatan sistem keuangan. Hal ini dapat mengurangi ketidakpastian dan kekhawatiran yang mungkin dimiliki masyarakat terhadap sistem keuangan yang berbeda dari yang mereka kenal sebelumnya.

PENGARUH KEBIJAKAN MONETER SYARIAH TERHADAP STABILITAS MATA UANG

Lebih lanjut, transparansi memungkinkan terbentuknya hubungan yang lebih kuat antara lembaga keuangan syariah dan masyarakatnya. Dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi tentang kebijakan, produk, dan operasi keuangan, lembaga keuangan syariah dapat memperoleh kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas keuangan syariah, yang pada gilirannya dapat memperkuat stabilitas dan keberlanjutan sistem keuangan syariah secara keseluruhan.

Kebijakan moneter yang adil memiliki dampak besar terhadap distribusi kekayaan dan stabilitas sosial-ekonomi dalam suatu negara. Pertama-tama, kebijakan yang mengutamakan keadilan dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara berbagai lapisan masyarakat. Dengan memberikan akses yang lebih adil terhadap sumber daya keuangan dan peluang ekonomi, kebijakan ini dapat meningkatkan partisipasi ekonomi dari segmen masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan, sehingga menciptakan stabilitas sosial yang lebih baik.

Selain itu, kebijakan moneter yang adil juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, di mana keuntungan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang atau kelompok. Dengan meningkatnya distribusi kekayaan dan kesempatan ekonomi, masyarakat akan memiliki daya beli yang lebih besar dan lebih stabil. Hal ini dapat menciptakan permintaan yang kuat untuk barang dan jasa dalam perekonomian, yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas mata uang.

Terakhir, kebijakan moneter yang adil dapat menciptakan iklim investasi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Dengan memastikan bahwa aturan dan regulasi ekonomi diterapkan secara adil dan konsisten, kebijakan ini menciptakan kepercayaan di antara pelaku pasar dan investor. Hal ini dapat mengurangi ketidakpastian ekonomi dan keuangan, serta mendorong aliran modal yang stabil ke dalam perekonomian. Dengan demikian, stabilitas ekonomi yang tercipta akan memengaruhi stabilitas mata uang negara tersebut, dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan.

Keseimbangan Ekonomi dalam Kebijakan Moneter Syariah:

Prinsip-prinsip keseimbangan ekonomi dalam kebijakan moneter syariah memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas mata uang suatu negara. Pertama-

tama, pendekatan yang berfokus pada keseimbangan ekonomi dalam konteks syariah mendorong pemerintah dan lembaga keuangan untuk menghindari ketidakseimbangan yang ekstrem, baik dalam penciptaan atau pengurangan uang beredar. Hal ini berarti bahwa kebijakan moneter akan cenderung lebih stabil dan terkendali, mengurangi kemungkinan terjadinya gejolak yang merugikan stabilitas mata uang.

Selanjutnya, prinsip keseimbangan ekonomi dalam kebijakan moneter syariah juga mendorong untuk memperhatikan berbagai sektor ekonomi secara proporsional. Misalnya, pendekatan yang adil terhadap sektor riil dan sektor keuangan akan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang seimbang terjadi di seluruh sektor, tanpa memberikan keuntungan yang tidak adil kepada satu sektor tertentu yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Dengan demikian, stabilitas mata uang akan dipertahankan dengan meminimalkan risiko ketidakseimbangan sektor.

Terakhir, prinsip keseimbangan ekonomi dalam kebijakan moneter syariah mendorong untuk menghindari spekulasi dan praktik-praktik finansial yang berlebihan. Ini berarti bahwa kebijakan moneter akan cenderung lebih berorientasi pada investasi produktif yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian, daripada pada aktivitas spekulatif yang dapat mengakibatkan fluktuasi yang tidak stabil dalam nilai tukar mata uang. Dengan demikian, pendekatan yang seimbang ini dapat membantu menjaga stabilitas mata uang dengan mengurangi volatilitas yang tidak perlu dalam pasar keuangan.

Menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan uang memiliki signifikansi yang besar dalam konteks ekonomi syariah. Salah satu aspek penting dalam menjaga keseimbangan ini adalah melalui pengelolaan likuiditas yang bijaksana oleh lembaga keuangan syariah. Dalam ekonomi syariah, likuiditas yang berlebihan dapat mengakibatkan inflasi dan merugikan stabilitas mata uang, sementara likuiditas yang terlalu rendah dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah perlu memastikan bahwa penawaran uang mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar, namun tidak berlebihan sehingga dapat menimbulkan ketidakseimbangan ekonomi.

Selain itu, menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan uang juga melibatkan pengaturan suku bunga yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Suku bunga yang adil dan sesuai dengan kondisi pasar akan membantu mengatur permintaan

PENGARUH KEBIJAKAN MONETER SYARIAH TERHADAP STABILITAS MATA UANG

uang dengan lebih efektif, mencegah terjadinya spekulasi berlebihan atau praktik-praktik yang tidak sehat dalam pasar keuangan. Hal ini juga akan mendukung stabilitas mata uang dengan mendorong investasi produktif dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Terakhir, menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan uang dalam ekonomi syariah juga melibatkan pengembangan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Instrumen-instrumen keuangan yang berbasis pada transaksi riil dan menghindari unsur riba atau spekulasi akan membantu menjaga keseimbangan yang sehat dalam ekonomi. Dengan demikian, penting bagi lembaga keuangan syariah untuk terus mengembangkan produk-produk keuangan yang inovatif dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah guna mendukung stabilitas mata uang dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Keberlanjutan dan Stabilitas Jangka Panjang:

Kebijakan moneter syariah memiliki peran krusial dalam mempromosikan stabilitas jangka panjang dalam sistem keuangan dan mata uang. Salah satu aspek utama yang membedakan kebijakan moneter syariah adalah fokusnya pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan. Dengan menghindari praktik riba dan spekulasi berlebihan, kebijakan moneter syariah membantu menciptakan fondasi yang kokoh untuk stabilitas ekonomi jangka panjang. Hal ini memungkinkan pasar keuangan untuk beroperasi secara lebih stabil dan dapat diandalkan, yang pada gilirannya mendukung stabilitas mata uang dalam jangka panjang.

Selain itu, kebijakan moneter syariah juga mendorong pengembangan lembaga keuangan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan mempromosikan inklusi keuangan dan mengarahkan aliran dana kepada sektor-sektor yang produktif secara ekonomi, kebijakan moneter syariah membantu memperkuat struktur keuangan yang dapat menahan goncangan ekonomi. Lembaga keuangan yang didasarkan pada prinsip syariah juga cenderung lebih berorientasi pada pembiayaan riil dan investasi yang berkelanjutan, yang berpotensi memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan stabilitas mata uang.

Terakhir, kebijakan moneter syariah secara inheren lebih berhati-hati dalam menghadapi risiko-risiko ekonomi dan keuangan. Dengan menekankan prinsip kehati-hatian dan penghindaran praktik spekulatif yang berlebihan, kebijakan moneter syariah

membantu mencegah terjadinya gelembung ekonomi dan krisis keuangan yang merugikan. Dengan demikian, kebijakan moneter syariah berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, yang pada akhirnya mendukung stabilitas mata uang dalam jangka panjang.

Kebijakan moneter syariah, dengan fokusnya pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kehati-hatian dalam pengelolaan ekonomi, dapat menghasilkan keberlanjutan ekonomi yang lebih baik. Dalam konteks ini, keberlanjutan tidak hanya mencakup pertumbuhan ekonomi yang stabil, tetapi juga kesinambungan dalam distribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan mendorong investasi yang berkelanjutan dan berorientasi pada pembiayaan riil, kebijakan moneter syariah membantu membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan jangka panjang. Hal ini menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil, yang pada gilirannya dapat menghasilkan stabilitas nilai tukar mata uang.

Salah satu dampak positif dari keberlanjutan ekonomi yang dihasilkan oleh kebijakan moneter syariah adalah meningkatnya kepercayaan investor dan pelaku pasar terhadap mata uang suatu negara. Dengan mengurangi ketidakpastian dan resiko ekonomi, kebijakan moneter syariah menciptakan iklim investasi yang lebih menarik dan berkelanjutan. Hal ini dapat meningkatkan permintaan terhadap mata uang negara tersebut, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap stabilitas nilai tukar mata uang.

Selain itu, keberlanjutan ekonomi yang dihasilkan oleh kebijakan moneter syariah juga membantu mengurangi volatilitas pasar keuangan. Dengan menekankan kehati-hatian dalam pengelolaan risiko dan mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan, kebijakan moneter syariah membantu mencegah terjadinya gejolak ekonomi yang merugikan. Hal ini dapat menjaga stabilitas nilai tukar mata uang dalam jangka panjang, karena pasar keuangan yang lebih stabil cenderung mengurangi fluktuasi nilai tukar mata uang. Dengan demikian, kebijakan moneter syariah dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap stabilitas nilai tukar mata uang dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Kebijakan moneter syariah memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas mata uang dalam sebuah ekonomi. Prinsip-prinsip utama kebijakan moneter syariah, seperti larangan riba, transparansi, keadilan, dan keseimbangan ekonomi, berperan

PENGARUH KEBIJAKAN MONETER SYARIAH TERHADAP STABILITAS MATA UANG

penting dalam menjaga stabilitas mata uang. Larangan riba mempengaruhi suku bunga, kredit, dan inflasi, yang secara langsung memengaruhi nilai tukar mata uang. Transparansi dalam kebijakan moneter syariah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan mata uang, sementara keadilan dalam distribusi kekayaan menciptakan stabilitas sosial ekonomi yang berkelanjutan. Prinsip keseimbangan ekonomi juga menjaga stabilitas mata uang dengan menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan uang. Dengan demikian, kebijakan moneter syariah secara keseluruhan mempromosikan stabilitas jangka panjang dalam sistem keuangan dan mata uang, yang pada akhirnya berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi dan stabilitas nilai tukar mata uang dalam jangka panjang.

DAFTAR REFERENSI

- Affandi, F. (2016). Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Nilai Tukar, BI-Rate dan Suku Bunga Bank Konvensional terhadap margin Bagi Hasil Deposito Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2010-2015. *At-Tawassuth*, 1(1), 45–72.
- Ali, H., & Miftahurrohman. (2015). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk), Non Performing Financing Dan Tingkat Suku Bunga Krdit Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (Mudharabah) Pada Perbankan Syariah Indonesia. *The Journal of Tawhidinomics*, 1(2), 151–166.
- Alwaris, S. A. A. P., & Hasan, N. (2023). Adopsi Nilai-Nilai Islam pada Instrumen Kebijakan Moneter dalam Mengontrol Peredaran Uang. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1), 65–77. <https://doi.org/10.30984/kunuz.v3i1.601>
- Dahlan, R. (2015). Pengaruh Tingkat Bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah Dan Tingkat Inflasi Terhadap Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia. *Etikonomi*, 13(2), 104–117. <https://doi.org/10.15408/etk.v13i2.1881>
- Ichsan, Nur, M. akhroh. (2017). Konsumtif Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode. *Analisis Pengaruh Ekonomi Makro Dan Stabilitas Perbankan Syariah Terhadap Pembiayaan Produktif Dan Konsumtif*, 12(23), 68–83.
- Indonesia, B. M. (n.d.). Prinsip Bisnis Syariah. In *Bank Muamalat Indonesia*. <https://www.bankmuamalat.co.id/artikel/apa-sih-prinsip-bisnis-syariah-itu>
- Mansur, A. (2013). Kebijakan Moneter dan Implikasinya terhadap Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam. *Tsaqafah*, 9(1), 57.

<https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v9i1.38>

- Perdana, K., Hamzah, E., & Lubis, P. (2020). Pengaruh Tingkat Inflasi, Suku Bunga BI, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia (Periode Januari 2013 – Desember 2017). *Najaha Iqtishod: Journal of Islamic Economic and Finance*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.22437/jief.v1i1.11511>
- Prasetyo. (2017). UNIKOM_Eko Prasetyo_KP_BAB III 2017. *UNIKOM_Eko Prasetyo_KP_BAB III 2017*, 23–39.
- Putri, C., & Sari, M. (2018). *PENGARUH KEBIJAKAN MONETER TERHADAP TINGKAT INFLASI DI INDONESIA The Effect Monetary Policy to Inflation in Indonesia*.
- Putri, I. A., & Nasution, E. O. A. (2022). Kebijakan Moneter Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 166. <https://doi.org/10.30821/se.v8i1.13778>
- Safitri, I. (2013). Pembiayaan Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Share*, 5(2), 155–164.
- Sitepu, N. I. (2017). PERAN BANK SYARIAH DALAM PENGENDALIAN HARGA (Studi Analisis Terhadap Perbankan Syariah di Indonesia). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1(1), 55–74. <https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6520>
- Syarif, A. (2019). Pengertian Penelitian Kualitatif. *Minat Masyarakat Berolahraga Rekreasi Di Kegiatan Car Free Day Di Kota Palangka Raya*, 6(Jurnal Ilmu Pendidikan), 14.
- Widyastuti, E. (2019). Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Tingkat Bagi Hasil Dan Suku Bunga Acuan BI Terhadap Volume Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah Di Indonesia (Periode 2016-2018). *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(2), 215. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v2i2.6071>
- Wulandari, I. H. (2021). Implikasi Kebijakan Moneter Syariah Indonesia Dan Malaysia Dalam Menjaga Stabilitas Perekonomian Periode 2015-2019. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 158. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57523%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/57523/1/11170860000051_Inayah Hanifatussilmi Wulandari.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57523%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/57523/1/11170860000051_Inayah%20Hanifatussilmi%20Wulandari.pdf)
- Yani, E., & M.Nur, M. (2020). Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Indonesia*, 9(2), 13.

**PENGARUH KEBIJAKAN MONETER SYARIAH TERHADAP
STABILITAS MATA UANG**

<https://doi.org/10.29103/ekonomika.v9i2.3179>